

RENCANA AKSI NTT FOOD SUMMIT 2008

Dalam Rangka

PENANGANAN KERAWANANAN PANGAN, PENGURANGAN KEMISKINAN, DAN PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



MAUMERE, 29 Oktober 2008

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup manusia. Oleh karenanya, pemenuhan pangan bagi setiap individu menjadi prioritas perhatian masyarakat dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang. World Summit yang diselenggarakan FAO tahun 1996 memberi tekanan lebih besar mengenai pentingnya ketahanan pangan dengan dikeluarkannya kesepakatan *“untuk mencapai ketahanan pangan bagi setiap orang dan untuk melanjutkan upaya menghilangkan kelaparan di seluruh negara”*. Sasaran jangka menengah yang akan dicapai adalah menurunkan jumlah orang yang miskin dan lapar menjadi setengahnya, paling lambat tahun 2015. Pernyataan-pernyataan konferensi pangan dunia tersebut menunjukkan besarnya masalah pangan serta adanya komitmen bangsa-bangsa di dunia atas pemenuhan pangan bagi seluruh penduduk serta perlunya penanganan secara bersama dengan program yang terarah dan terukur.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengakui arti penting pangan dan mengakui pangan sebagai hak asasi manusia. Hal itu antara lain tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. UU Pangan menjelaskan : *“bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional.”* Lebih lanjut PP Ketahanan Pangan menyebutkan : *“ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional untuk membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera.”*

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang kompleks yang mencakup sub-sistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Dengan demikian, ketahanan pangan harus dibangun secara lintas sektor, lintas pelaku dan lintas daerah. Pada sisi lain, perkembangan liberalisasi perdagangan di tingkat internasional mengharuskan Indonesia untuk membuat kebijakan perdagangan yang mampu melindungi dan mengembangkan sistem ketahanan pangan nasional. Oleh karenanya dalam era reformasi yang telah berjalan sepuluh tahun ini diperlukan suatu revitalisasi peran pemerintah untuk menjadi fasilitator, regulator dan motivator pemberdayaan ketahanan pangan. Koordinasi dan harmonisasi serta sinergi kebijakan dan program ketahanan pangan kemudian menjadi kunci keberhasilan pembangunan ketahanan pangan nasional, daerah, lokal dan keluarga.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan pangan yang dihadapi masyarakat di Nusa Tenggara Timur, pemerintah bersama sama masyarakat dan stakeholders serta pihak lainnya yang juga menaruh perhatian terhadap persoalan tersebut telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Berbagai upaya tersebut telah memberikan hasil yang baik, namun masih ada berbagai kelemahan sehingga belum menghasilkan perubahan yang diinginkan, yakni NTT bebas dari kerawanan pangan, gizi buruk, kelaparan dan kemiskinan.

Berdasarkan Peta Kerawanan Pangan RI Tahun 2005, bahwa semua kabupaten di NTT kecuali Kabupaten Ngada termasuk dalam 100 kabupaten rawan pangan di Indonesia yang memerlukan prioritas penanganan. Oleh karenanya hal penting yang perlu diperbaiki dan diperkuat antara lain adalah kesamaan pemahaman, strategi dan sinergi di antara para pemangku kepentingan untuk memperkuat ketahanan pangan NTT. Momentum ini sangat

strategis untuk melakukan kolaborasi rencana aksi dengan mengembangkan pemahaman dan strategi bersama serta kerjasama yang lebih kuat dan sinergis di antara para pemangku kepentingan untuk memantapkan ketahanan pangan dan mempercepat pengurangan angka kerawanan pangan, gizi buruk, kelaparan dan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur.

1.2. Kondisi dan Permasalahan

- a. Survey bank dunia tahun 1998 menunjukkan bahwa diantara 3 Provinsi yang di survey (NTT, Jawa Tengah dan Jambi), NTT memiliki Sosial Capital yang paling tinggi. Sosial capital adalah sebuah modal penting untuk mengurangi rawan pangan dan kemiskinan.
- b. Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat telah mencanangkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama (urusan wajib) di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- c. Nusa Tenggara Timur tidak seperti Provinsi lainnya, karena unik dalam hal keberadaan NGO lokal dan Internasional di hampir semua kabupaten yang bekerja berkaitan dengan ketahanan pangan.
- d. Namun demikian, kejadian kerawanan pangan masih terjadi.

1.3. Tujuan

- a. Rencana aksi ini disusun untuk menjadi acuan bersama bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu pemerintah, swasta, Organisasi masyarakat sipil dan petani serta pihak lainnya yang menaruh perhatian terhadap permasalahan pangan dan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- b. Merancang kolaborasi program jangka pendek dan jangka panjang dan aksi yang terkoordinasi untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi kerawanan pangan serta kemiskinan di Provinsi NTT
- c. Mengembangkan sinergisitas, integrasi dan koordinasi dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu mengatasi kerawanan pangan, mengurangi kemiskinan dan memantapkan ketahanan pangan masyarakat di Nusa Tenggara Timur.

1.4. Lingkup

Rencana Aksi Penanganan Kerawanan pangan, kemiskinan dan pemantapan ketahanan pangan di NTT dilakukan melalui kolaborasi penanganan dari berbagai stakeholders secara komprehensif (Sosial, Ekonomi dan Budaya) yang meliputi beberapa aspek yaitu : Ketersediaan pangan, Konsumsi /Kesehatan, Akses pangan, Sarana dan prasarana. Melalui berbagai kegiatan antara lain : pengembangan komoditi, peningkatan pelayanan kesehatan, pengembangan akses pangan, pengembangan sarana dan prasarana penunjang dan peningkatan koordinasi dan manajemen serta peningkatan partisipasi masyarakat.

II. GAMBARAN UMUM WILAYAH NTT

A. Geografis

Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas 19 Kabupaten dan 1 Kota, membentang diantara 8 – 12 Lintang Selatan dan 118 – 125 Bujur Timur, dengan luas daratan seluruhnya 47.349,9 km² dan luas perairan mencapai 200.000 km². Bagian Utara berbatasan dengan laut flores, bagian selatan berbatasan dengan Laut Timor dan Lautan Indonesia, sebelah Timur dengan Negara Timor Leste dan Provinsi Maluku, disebelah Barat dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai jarak yang relatif dekat dengan Negara Australia dan Negara-negara Pasifik Selatan. Dengan demikian merupakan bagian dalam lingkaran pasifik dan memiliki akses yang relatif besar untuk perdagangan bebas di kawasan pasifik.

B. Topografi

Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam daerah semi arid karena curah hujan relatif rendah serta keadaan vegetasi yang didominasi savanna dan stepa. Secara morfologis, sebagian besar (75 %) wilayah daratan merupakan daerah yang bergunung dan berbukit dengan derajat kemiringan mencapai 45 %, dibarengi dengan permukaan tanah yang kritis dan gundul, sehingga peka terhadap erosi, namun di beberapa wilayah terdapat hamparan dataran rendah yang cukup luas dan subur dan sangat potensial untuk pengembangan komoditi pertanian..

C. Iklim

Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur beriklim tropis kering yang dipengaruhi oleh angin muson. Musim hujan berlangsung kurang lebih 4 bulan (Desember-Maret) sedangkan musim panas mencapai kurang lebih 8 bulan (April-Nopember) dengan curah hujan yang tidak merata. Pada musim hujan, curah hujan tertinggi terjadi di Pulau Flores bagian Barat, pulau Sumba bagian Barat dan Pulau Timor bagian Tengah, dengan kisaran curah hujan antara 2.000 – 3.000 mm/tahun. Sedangkan curah hujan terendah pada wilayah lain di Pulau Flores, Sumba dan Alor dengan rata-rata curah hujan 1.500 mm/tahun.

D. Penduduk.

Perkembangan jumlah penduduk rata-rata 1,59 % per tahun. Jumlah Penduduk tahun 2007 sebanyak 448. jiwa yang terdiri dari laki-laki : jiwa dan perempuan jiwa.

Masih tingginya angka penduduk miskin dan penduduk yang buta huruf. Sebagian besar mata pencaharian di sektor pertanian (81 %) dengan demikian kegagalan dalam usahanya akan berdampak cukup luas terhadap tingkat ketahanan pangan masyarakat.

Jumlah penduduk tahun 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 adalah : 4.073.700; 4.155.065; 4.188.744; 4.260.344; 4.448.873 jiwa.

Pada sisi lain dominasi penduduk miskin NTT lebih banyak bermukim di pedesaan. Hal ini berarti bahwa kantong-kantong kemiskinan NTT masih berada di pedesaan. Kondisi ini menggambarkan bahwa potensi sumber daya yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat..

E. Potensi Lahan

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi lahan yang cocok untuk kegiatan usaha taninya seluas 3.074.750 Ha yang terdiri dari lahan kering seluas 2.379.005 Ha (94.29 %) dan lahan basah 127.308 ha. Lahan kering yang sudah dimanfaatkan seluas 1.556.155 Ha (65,41 %). yang tersebar di 19 Kabupaten dan 1 Kota.

III. KERAGAAN KETAHANAN PANGAN DI NTT

3.1. Produksi dan Ketersediaan

3.1.1. Produksi

A. Luas Tanam, Produktivitas dan Produksi Padi Tahun 2007

No	Kabupaten	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kwt/Ha)	Produksi (Ton)
1	Sumba Barat	23.956	30,02	71.920
2	Sumba Timur	7.817	34,18	26.720
3	Kupang	10.987	28,69	31.524
4	Timor Tengah Selatan	3.909	32,99	12.895
5	Timor Tengah Utara	8.016	26,87	21.538
6	Belu	5.269	31,62	16.660
7	Alor	4.136	20,43	8.451
8	Lembata	3.268	20,52	6.707
9	Flores Timur	6.643	22,06	14.657
10	Sikka	8.882	25,29	22.466
11	Ende	5.510	25,32	13.954
12	Ngada	13.335	31,02	41.364
13	Manggarai	37.126	33,28	123.572
14	Manggarai Barat	20.591	34,04	22.744
15	Rote Ndao	7.199	31,59	70.097
16	Kota Kupang	109	32,94	359
	NTT	166.753	30,32	505.628

Sumber : BPS. NTT dalam Angka 2007

B. Luas Tanam, Produktivitas dan Produksi Jagung Tahun 2007

No	Kabupaten	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kwt/Ha)	Produksi (Ton)
1	Sumba Barat	24.567	23,72	58.283
2	Sumba Timur	7.700	22,72	17.496
3	Kupang	23.949	24,55	58.788
4	Timor Tengah Selatan	46.260	24,19	111.882
5	Timor Tengah Utara	21.791	24,34	53.039
6	Belu	35.110	23,39	82.120
7	Alor	5.051	23,18	11.708
8	Lembata	6.279	22,13	13.893
9	Flores Timur	9.458	22,27	21.266
10	Sikka	10.525	21,33	22.450
11	Ende	3.318	23,17	7.689
12	Ngada	10.500	25,23	26.493
13	Manggarai	6.289	22,32	14.036
14	Manggarai Barat	2.375	22,28	5.291

15	Rote Ndao	3.758	23,53	8.841
16	Kota Kupang	458	23,69	1.085
	NTT	217.478	23,65	514.360

Sumber : BPS. NTT dalam Angka 2007

C. Luas Tanam, Produktivitas dan Produksi Ubi Kayu tahun 2007

No	Kabupaten	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kwt/Ha)	Produksi (Ton)
1	Sumba Barat	9.107	101,16	92.129
2	Sumba Timur	1.884	106,61	20.085
3	Kupang	4.974	106,09	52.768
4	Timor Tengah Selatan	14.500	100,15	145.223
5	Timor Tengah Utara	5.065	100,48	50.893
6	Belu	11.150	105,93	118.109
7	Alor	2.791	101,34	28.283
8	Lembata	2.022	108,90	22.020
9	Flores Timur	4.108	103,04	42.327
10	Sikka	5.807	100,20	58.188
11	Ende	1.459	98,50	14.371
12	Ngada	2.684	109,24	29.319
13	Manggarai	5.867	112,56	66.041
14	Manggarai Barat	4.439	113,32	50.304
15	Rote Ndao	197	104,16	2.052
16	Kota Kupang	193	104,09	2.009
	NTT	76.247	104,15	794.121

Sumber : BPS. NTT dalam Angka 2007

D. Produksi Perikanan (Perikanan Laut dan Tangkap) tahun 2007

No	Kabupaten	Produksi (Ton)
1	Sumba Barat	2.979,6
2	Sumba Timur	4.511,1
3	Kupang	12.252,5
4	Timor Tengah Selatan	1.437,6
5	Timor Tengah Utara	1.121,4
6	Belu	1.037,8
7	Alor	11.608,1
8	Lembata	4.882,7
9	Flores Timur	13.186,2
10	Sikka	9.979,5
11	Ende	5.669,7
12	Ngada	3.051,6
13	Manggarai	2.214,5
14	Manggarai Barat	10.061,2
15	Rote Ndao	2.535,7

16	Kota Kupang	17.223
	NTT	103.825,5

Sumber : BPS. NTT dalam Angka 2007

E. Populasi Ternak Tahun 2007

No	Kabupaten	Sapi	Kerbau	Kuda
1	Sumba Barat	6.770	34.789	17.680
2	Sumba Timur	42.612	35.498	29.603
3	Kupang	141.850	7.398	12.587
4	Timor Tengah Selatan	123.718	534	4.983
5	Timor Tengah Utara	60.616	752	2.396
6	Belu	93.354	2.645	3.934
7	Alor	1.323	13	152
8	Lembata	1.469	5	1.628
9	Flores Timur	1.618	37	2.560
10	Sikka	4.985	521	3.283
11	Ende	6.918	2.661	2.628
12	Ngada	35.658	12.652	8.754
13	Manggarai	8.589	15.881	6.313
14	Manggarai Barat	2.283	20.832	1.209
15	Rote Ndao	15.107	10.727	4.492
16	Kota Kupang	3.513	34	54
	NTT	555.383	144.979	102.256

Sumber : BPS. NTT dalam Angka 2007

Lanjutan (populasi ternak)

No	Kabupaten	Kambing	Domba	Babi
1	Sumba Barat	11.118	183	58.986
2	Sumba Timur	41.150	939	37.736
3	Kupang	83.838	31.664	105.639
4	Timor Tengah Selatan	36.932	0	275.125
5	Timor Tengah Utara	17.436	36	65.654
6	Belu	13.298	23	105.328
7	Alor	28.236	6	69.920
8	Lembata	32.387	472	50.258
9	Flores Timur	58.013	2.175	131.816
10	Sikka	38.281	207	101.439
11	Ende	22.243	48	70.375
12	Ngada	46.040	3.219	152.433
13	Manggarai	35.612	55	99.573
14	Manggarai Barat	9.916	47	46.158
15	Rote Ndao	32.748	20.206	64.773
16	Kota Kupang	4.446	39	22.336
	NTT	511.694	59.319	1.457.549

Sumber : BPS. NTT dalam Angka 2007

No	Kabupaten	Ayam Lokal	Ayam Ras	Itik
1	Sumba Barat	647.186	1.109	1.109
2	Sumba Timur	531.116	1.383	1.383
3	Kupang	1.988.171	86.303	18.963
4	Timor Tengah Selatan	804.204	0	10.168
5	Timor Tengah Utara	143.635	1.143	9.435
6	Belu	795.714	0	21.135
7	Alor	382.410	6.516	12.203
8	Lembata	196.240	0	18.765
9	Flores Timur	517.584	0	11.306
10	Sikka	512.341	0	46.822
11	Ende	1.765.745	0	60.373
12	Ngada	654.760	3.046	18.357
13	Manggarai	640.767	0	8.523
14	Manggarai Barat	124.489	0	11.983
15	Rote Ndao	113.797	0	278
16	Kota Kupang	24.732	3.936	2.681
	NTT	9.842.891	103.436	253.484

Sumber : BPS. NTT dalam Angka 2007

3.1.2 Ketersediaan Pangan

Ketersediaan rata-rata perkapita untuk kalori, protein dan lemak dari sumber nabati dan hewani berdasarkan hasil analisa neraca bahan makanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2004 – 2007 disajikan pada tabel berikut :

URAIAN	TAHUN			
	2004	2005	2006	2007
I. ENERGI (Kalori)	3.983	3.523	3.350	3.335
NABATI	3.850	3.365	3.211	3.218
HEWANI	133	158	140	117
II. PROTEIN (Gram)	89,90	81,07	76,57	77,86
NABATI	81,22	70,65	66,89	67,74
HEWANI	8,68	10,42	9,68	10,12
III. LEMAK (Gram)	43,13	41,72	42,43	36,52
NABATI	32,60	29,21	31,62	28,28
HEWANI	10,53	12,51	10,81	8,23

2.2. Konsumsi Pangan

- Berdasarkan hasil analisa Pola Pangan Harapan Provinsi NTT Tahun 2007 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat konsumsi energi penduduk NTT mencapai 1.947 kkal/kapita/hari dan protein mencapai 46,48 gram/kapita/hari.
- Standar rata angka konsumsi yang ideal sesuai hasil Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2004 sebesar 2.000 kalori/kapita/hari dan protein sebesar 52 gram/kapita/hari.
- Dengan demikian tingkat konsumsi pangan (energi) masyarakat NTT telah mencapai sebesar 97,35 % terhadap kondisi konsumsi yang diharapkan/ideal.
- Mutu konsumsi pangan masyarakat NTT sesuai hasil analisa Pola pangan Harapan (PPH) dengan skor 83,6 dimana skor maksimum 100.
- Hal ini berarti capaian tingkat konsumsi masyarakat NTT masih berada pada ambang masalah konsumsi pangan dengan kategori ideal (90 – 119 % AKG).

2.3. Kemiskinan dan Kerawanan Pangan

A. Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2005 dan Rawan Pangan Transient tahun 2007 di NTT

No	Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin			Jumlah Penduduk Rawan Pangan	
		Jml. Pdd	Jml Pddk Miskin	%	Jml Pdd	%
1	Kupang	373.663	115.200	30,83	248.831	66,59
2	Kota Kupang	286.299	49.200	17,18	2.190	0,77
3	Rote Ndao	112.553	33.100	29,41	97.319	86,47
4	Timor Tengah Selatan	415.660	160.600	38,64	152.966	36,60
5	Timor Tengah Utara	211.350	74.500	35,25	18.281	8,65
6	Belu	418.004	178.400	42,68	97.408	23,30
7	Alor	178.964	57.800	32,30	38.538	21,53
8	Lembata	104.440	46.700	44,71	36.185	34,65
9	Flores Timur	229.918	38.100	16,57	209.520	91,13
10	Sikka	277.627	76.100	27,41	-	-
11	Ende	238.040	51.900	21,80	104.923	44,08
12	Ngada	504.163	58.400	11,58	65.532	13,00
13	Manggarai	504.163	172.800	34,27	127.371	25,26
14	Manggarai Barat	201.129	71.600	35,60	194.034	96,47
15	Sumba Timur	223.116	118.700	53,20	86.199	38,63
16	Sumba Barat	419.308	243.000	57,95	228.388	54,47
	NTT	4.448.873	1.546.100	34,75	1.707.685	38,38

Catatan : Data Kemiskinan ; Sumber SUSENAS (BPS) 2005
Data Rawan Pangan Transient, B2KP NTT Tahun 2007

B. Kondisi Kerawanan Pangan Kronis

Berdasarkan Peta rawan pangan Provinsi Nasional, dari 14 Kabupaten/kota di Provinsi NTT yang di analisa terdapat 13 kabupaten rawan pangan dengan 3 tingkatan prioritas penanganan yaitu :

- | | | |
|-------------------------|---|---------------|
| 1. Sumba Barat | } | Prioritas I |
| 2. Manggarai | | |
| 3. Sumba Timur | | |
| 4. Timor Tengah Selatan | | |
| 5. Alor | } | Prioritas II |
| 6. Lembata | | |
| 7. Kupang | | |
| 8. Belu | | |
| 9. Ende | | |
| 10. Sikka | | |
| 11. Timor Tengah Utara | } | Prioritas III |
| 12. Flores Timur | | |
| 13. Ngada -----> | | |

C. Status Gizi Balita (Gizi Buruk dan Gizi Kurang) di NTT Thn 2007

No	Kabupaten	Status Gizi				
		Jml. Balita	Jml. Balita Gizi Kurang	%	Gizi Buruk	%
1	Kupang	42.721	5.339	12,50	2.192	5,13
2	Kota Kupang	24.007	3.023	12,59	291	1,21
3	Rote Ndao	13.060	1.211	9,27	222	1,70
4	Timor Tengah Selatan	53.608	14.039	26,19	3.118	5,82
5	Timor Tengah Utara	27.378	7.267	26,54	1.483	5,42
6	Belu	48.622	1.073	2,21	151	0,31
7	Alor	16.264	2.536	15,60	439	2,70
8	Lembata	12.454	2.075	16,66	140	1,12
9	Flores Timur	23.044	1.316	5,71	22	0,09
10	Sikka	32.556	7.955	24,43	407	1,25
11	Ende	25.000	3.025	12,1	434	1,74
12	Ngada	15.319	1.835	11,98	18	0,12
13	Manggarai	36.517	2.779	7,61	241	0,66
14	Manggarai Barat	28.883	31.417	108,77	635	2,20
15	Sumba Timur	23.352	552	2,36	50	0,21
16	Sumba Barat	11.498	1.296	11,27	752	6,54
17	Sumba Barat Daya	33.344	1.954	5,86	919	2,76
18	Sumba Tengah	7.654	992	12,96	280	3,66
19	Manggarai Timur	32.016	3.958	12,36	232	0,72
20	Nagekeo	12.891	938	7,28	1	0,01
	NTT	520.186	94.580	18,18	12.427	2,39

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. NTT ; Keadaan 10 Oktober 2008

IV. PELAKSANAAN NTT FOOD SUMMIT

1. Tema :

Thema NTT Food Summit Tahun 2008 adalah :

“MOMENTUM MEMBANGUN KETAHANAN PANGAN NTT BARU “

2. Waktu dan Tempat

NTT Food Summit tahun 2008 dilaksanakan di Hotel Beng Goan III, Jln K. S. Tubun-Maumere pada tanggal 28 – 29 Oktober 2008 yang dibuka oleh Wakil Gubernur NTT (Ir. Esthon L. Foenay, Msi), dengan perincian kegiatan pembukaan sbb :

- Laporan Ketua Panitia disampaikan oleh : Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan Provinsi NTT
- Sambutan dan Pembukaan Wakil Gubernur NTT
- Penyampaian Hasil Mubes Petani oleh : Wakil Petani dari Daratan Timor atas nama : Frederikus Olin dan Perwakilan Daratan Flores atas nama : Rofina Jenia dan Huber Habur.
- Keynote Speech oleh 2 pembicara yaitu : Kepala Biro Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Perumahan, Setwapres RI (Dr. Sonya Priyadharsini) dan Sesepuh Nusa Tenggara Timur/Mantan Gubernur NTT (dr. Ben Mboi)

3. Narasumber

- Peran lembaga Internasional dalam rangka Pemantapan Ketahanan Pangan di NTT oleh Nguyen Duc Hoang (Pimpinan WFP-Kupang)
- Dukungan DPRD dalam Penanganan Kerawanan pangan dan Pemantapan Ketahanan Pangan di NTT oleh Drs. Melkianus Adoe (Ketua DPRD Provinsi NTT)
- Kajian Pengembangan Lahan Kering dan Pemantapan Ketahanan Pangan di NTT oleh Dr. Ir. Samuel S. Pakan, MSc (Dekan Fakultas Pertanian Undana-Kupang)
- Pemandangan Lembaga Keagamaan dalam Pemantapan Ketahanan Pangan dan Mengatasi Kerawanan pangan di NTT oleh Petrus Turang,Mgr (Uskup Agung Kupang)
- Membangun dan memanfaatkan Sosial Capital untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Mengurangi Kerawanan Pangan di NTT oleh Dr. Ir. Tjuk Eko Hari Basuki, MSc (Kapus Ketersediaan dan Kerawanan Pangan BKP Deptan RI)

4. Kepesertaan :

- Pemerintah Pusat sebagai Narasumber (Resources Person),
- Unsur Dewan Perwakilan Rakyat (Provinsi, Kabupaten/Kota)

- Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (Gubernur, Wakil Gubernur, Biro Ekonomi, BAPPEDA, BKP2, Distan TPH, Dinsos, Dishut, Disbun, Dinkop, Perikanan, Kimpraswil, Disnak) ;
- Organisasi Internasional (WFP) ;
- NGO Internasional (VECO Indonesia, Swiss Contact)
- NGOs Nasional/Lokal (Bina Desa, SBIB, Kehati, KRKP)
- Lembaga keagamaan (Gereja)
- Masyarakat lokal/masyarakat adat ;
- Petani.
- Para Pakar (Undana-Kupang, UMK-Maumere, Unipa-Maumere, ABA St. Maria-Maumere, LPTP-Maumere, UKAW-Kupang,)

4. Mekanisme Pertemuan

Pertemuan dilaksanakan melalui :

- Pidato dari Keynote Speaker
- presentase narasumber
- diskusi kelompok
- Perumusan Rencana Aksi Bersama dan Deklarasi.

V. PERAN STAKEHOLDERS DALAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN, MENGURANGI KEMISKINAN DAN PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

A. Peran dan Dukungan Stake Holders

1. Pemerintah Pusat :

- Terus memberikan dukungan kebijakan dan anggaran bagi pengembangan ketahanan pangan dalam kerangka menangani kerawanan pangan ;
- Memberikan prioritas penanganan rawan pangan di NTT sesuai Peta Kerawanan Pangan Nasional Tahun 2005 secara konsisten dan berkelanjutan ;
- Mengkaji dan/atau mencabut kebijakan dan regulasi bagi alih fungsi lahan di lahan pertanian, hutan, pesisir dan laut yang mengancam ketahanan pangan ;
- Menetapkan kebijakan dan mekanisme ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dengan mengandalkan keunggulan potensi lokal ;
- Memberikan dukungan kebijakan dan anggaran untuk mengatasi masalah irigasi serta konservasi air ;
- Menetapkan strategi antisipasi, adaptasi dan mitigasi bagi perubahan iklim dan pemanasan global ;

2. Pemerintah Provinsi NTT :

- Mengorganisir dan mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota, NGO, Donor dan masyarakat ;
- Melakukan pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi peningkatan ketahanan pangan ;
- Mengembangkan kerjasama dengan mitra diluar pemerintah untuk mengakses modal, pasar dan teknologi peningkatan produksi pangan ;
- Memfasilitasi penelitian dan pengkajian ketahanan pangan ;
- Membuka akses bagi pengembangan inisiatif lokal untuk peningkatan ketahanan pangan ;
- Mengkoordinasikan percepatan pengurangan angka kemiskinan, rawan pangan dan gizi buruk ;

3. Pemerintah Kabupaten/Kota

- Merencanakan dan melaksanakan program/kegiatan peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerawanan pangan ;
- Memfasilitasi masyarakat terhadap prasarana pendukung, sarana produksi pertanian dan permodalan ;
- Meningkatkan dukungan sistim penyuluhan yang efektif bagi masyarakat ;
- Melakukan pengkajian dan pemetaan ketahanan pangan ;
- Memberi bantuan pangan dalam kondisi emergensi ;
- Memfasilitasi dan mendorong masyarakat melakukan konservasi tanah, air dan lingkungan hidup ;
- Proaktif mengakses dan mengakomodir inisiatif lokal bagi kebijakan peningkatan ketahanan pangan dalam bentuk regulasi;

- Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK);
- Melakukan gerakan bagi percepatan pengurangan angka kemiskinan, rawan pangan dan gizi buruk ;

4. DPRD (Provinsi + Kabupaten)

- Memberikan dukungan legislasi berupa regulasi yang kondusif bagi efektifitas peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerawanan pangan ;
- Memberi dukungan kebijakan anggaran ;
- Meningkatkan pengawasan yang efektif untuk mendorong perhatian pemerintah dan masyarakat dalam percepatan peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerawanan pangan ;

5. Perguruan Tinggi :

- Mengkaji potensi pengembangan pertanian lahan kering ;
- Mengkaji peningkatan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi ;
- Menyediakan teknologi dan inovasi bagi peningkatan ketahanan pangan lokal spesifik wilayah ;

6. Lembaga Agama

- Memberikan dukungan berupa peningkatan nilai-nilai social capital dalam masyarakat ;
- Memberikan himbauan untuk mendorong pemanfaatan lahan secara optimal dan berkelanjutan ;
- Mengembangkan kapasitas petani dan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk peningkatan ketahanan pangan ;
- Meningkatkan kerjasama dengan seluruh stake holder demi percepatan peningkatan ketahanan pangan ;

7. NGOs

- Memberikan dukungan berupa bantuan teknis dalam peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerawanan pangan ;
- Penguatan kapasitas petugas dan petani dalam peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerawanan pangan ;
- Meningkatkan fungsi dan sistem kewaspadaan dini, peta kerawanan pangan dan informasi ketahanan pangan (buletin) ;
- Memberikan intervensi nutrisi kepada ibu hamil, menyusui, balita (12-59 bulan) dan anak sekolah dasar ;
- Memberikan pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat untuk kemandirian pangan ;

8. Masyarakat Petani dan Nelayan

- Penguatan organisasi kelembagaan petani dan nelayan ;
- Meningkatkan kerjasama dalam kelompok tani untuk meningkatkan posisi tawar ;

- o Mengembangkan rencana kerja kelompok sesuai kondisi lokal ;
- o Melakukan advokasi untuk memperoleh akses lahan dan sumberdaya lahan
- o Membangun kerjasama dengan semua pihak yang ada
- o Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat petani dan nelayan
- o Menyelenggarakan proses produksi

B. Dukungan Stake holders

a). Pengorganisasian

- Dewan Ketahanan Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai Koordinator (leading) bagi tindak lanjut pelaksanaan Rencana Aksi NTT Food Summit tahun 2008 ;
- Implementasinya dikukuhkan melalui Surat Keputusan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi/Kab/Kota.

b). Pendanaan :

i. Sumber :

1. Pemerintah (APBN, APBD)
2. Donor ;
3. Swasta ;
4. Swadaya Masyarakat ;
5. Perbankan ;
6. Koperasi
7. LKM
8. dll

ii. Sistem

- o Seluruh stake holder menjabarkan program dan kegiatan yang mengacu pada rencana aksi bersama NTT Food Summit tahun 2008 ;
- o Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan secara internal oleh masing-masing stake holder secara periodik setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan ;
- o Evaluasi tahunan yang menyeluruh tentang pencapaian hasil Rencana Aksi dilakukan setiap tahun menjelang Hari Pangan Sedunia dalam forum Pertemuan Evaluasi NTT Food Summit dengan sumber pembiayaan dari APBD, NGOs, dan Aliansi Masyarakat Sipil.

c). Pelaporan :

1. Setiap stake holder melaporkan Rencana Aksi dari penjabaran Rencana Aksi bersama NTT Food Summit tahun 2008 ;
2. Melaporkan hasil implementasi yang meliputi strategi, metodologi, sumber pembiayaan, indikator keberhasilan, lokasi, dan sasaran masyarakat ;
3. Laporan disampaikan kepada DKP dalam frekwensi bulanan, triwulan, semester dan tahunan dengan mengacu pada format yang dikeluarkan oleh DKP Provinsi/Kabupaten/Kota ;

V. RENCANA AKSI BERSAMA

No	Tujuan Kebijakan	Kegiatan	Pelaksana	Indikator Keberhasilan (output)	Lokasi
1.	Mengurangi Angka Kemiskinan dan Kelaparan secara signifikan	Pemberdayaan masyarakat miskin	Penanggung Jawab : BPMD, TKPKD, NGOs, Lembaga Donor, Masyarakat.	Menurunnya angka kemiskinan dan kelaparan secara signifikan	20 Kabupaten/kota
2	Menjamin Ketersediaan Pangan Masyarakat	Mempermudah akses lahan pertanian oleh masyarakat	Penanggung Jawab : Bupati, BPN, Tokoh Adat	Tersedianya lahan pangan yang cukup untuk produksi pangan lokal	20 Kabupaten/kota
		Meningkatkan ketersediaan air untuk pertanian	Penanggung Jawab : Kimpraswil, Kehutanan	Tersedianya air untuk pertanian dan kehutanan	20 Kabupaten/Kota

No	Tujuan Kebijakan	Kegiatan	Pelaksana	Indikator Keberhasilan (output)	Lokasi
		Pengembangan dan penyediaan benih tanaman pangan lokal	Penanggung Jawab : Dinas Pertanian	Tersedianya benih tanaman pangan lokal yang dikembangkan oleh petani	20 Kabupaten/Kota
		Penyediaan skim permodalan bagi petani/nelayan	Penanggung Jawab : Perbankan (BUMN/BUMD) Koperasi, LKM	Tersedianya skim kredit yang mudah diakses dan tidak memberatkan petani/nelayan	20 Kabupaten/Kota
		Pencapaian ketersediaan keanekaragaman komoditas strategis (jagung, padi, umbi-umbian, ternak, buah-buahan, mete, ikan)	Penanggung Jawab : BKP2, Dinas Pertanian, LSM, Petani, Perikanan dan Kelautan	Tersedianya berbagai bahan pangan Strategis produksi dalam negeri yang dapat dijangkau oleh semua orang.	20 Kabupaten/Kota

No	Tujuan Kebijakan	Kegiatan	Pelaksana	Indikator Keberhasilan (output)	Lokasi
		Fasilitasi penguatan kelembagaan petani/nelayan dan kemitraan	Penanggung Jawab : Koperasi, BKP2, LSM, Organisasi Profesi Petani/nelayan	Berkembangnya kelembagaan petani/nelayan sebagai lembaga usaha yang mandiri	20 Kabupaten/Kota
3.	Menata Pertanahan, Tata Ruang dan Wilayah	Pengembangan reforma agraria	Penanggung Jawab : BPN, Kepala Daerah, DPRD	Terwujudnya kebijakan pengelolaan lahan pertanian dan wilayah tangkapan nelayan	20 Kabupaten/Kota
		Penyusunan tata ruang daerah dan wilayah	Penanggung Jawab : Kepala Daerah BAPPEDA, DPRD	Tersusunnya RUTRW yang mempertimbangkan potensi masing-masing wilayah	20 Kabupaten/Kota
		Perbaikan administrasi pertanahan dan sertifikasi lahan	Penanggung Jawab : Kepala Daerah, BAPPEDA, DPRD	Terciptanya administrasi pertanahan yang memadai dan tidak memberatkan rakyat	20 Kabupaten/Kota

No	Tujuan Kebijakan	Kegiatan	Pelaksana	Indikator Keberhasilan (output)	Lokasi
		Pengenaan sistem perpajakan progresif bagi pelaku alih fungsi lahan pertanian	Penanggung Jawab : Kepala Daerah, DPRD	Terhentinya alih fungsi lahan pertanian	20 Kabupaten/Kota
4.	Mengembangkan Cadangan pangan	Pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat di berbagai tingkatan	Penanggung Jawab : Bulog, BKP2, BPMD, Dinas Sosial, Poktan, Gapoktan, Koperasi	Tersedianya cadangan pangan pokok di setiap daerah dan rumah tangga dengan menjamin akses yang sama bagi setiap orang	20 Kabupaten/Kota
		Pengembangan lumbung pangan Masyarakat	Penanggung Jawab : BKP2, BPMD, Poktan, Gapoktan, Koperasi	Terintegrasinya sistem cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat yang dapat diakses oleh kelompok masyarakat	20 Kabupaten/Kota

No	Tujuan Kebijakan	Kegiatan	Pelaksana	Indikator Keberhasilan (output)	Lokasi
5.	Mengembangkan Sistem Distribusi Pangan	Pengembangan sistem distribusi pangan yang Adil dan Efisien	Penanggung Jawab: Disperindag, Bulog, Perhubungan, BKP2,	Terlaksananya Sistem distribusi pangan yang Adil dan Efisien	20 Kabupaten/Kota
		Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana distribusi	Penanggung Jawab: Kimpraswil, Perhubungan, Swasta, Koperasi, Poktan, Gapoktan	Pembangunan infrastruktur desa untuk mendukung distribusi usahatani, dengan prioritas pada daerah lumbung pangan	20 Kabupaten/Kota
		Penghapusan retribusi produk pertanian pangan dan perikanan lokal	Penanggung Jawab: Dispenda, DPRD.	Hilangnya retribusi yang memberatkan petani dan pedagang kecil	20 Kabupaten/Kota
		Peningkatan akses transportasi ke daerah terpencil dan rawan pangan.	Penanggung Jawab: Kimpraswil, Perhubungan	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi dan akses pangan di daerah rawan pangan dan daerah terpencil.	20 Kabupaten/Kota
		Pengawasan sistem persaingan	Penanggung Jawab: Perindag,	Berlakunya mekanisme	20 Kabupaten/Kota

No	Tujuan Kebijakan	Kegiatan	Pelaksana	Indikator Keberhasilan (output)	Lokasi
		perdagangan yang tidak sehat	Koperasi, Asosiasi.	pasar yang adil	
6.	Menjaga Stabilitas Harga Pangan	Pemantauan harga pangan pokok secara berkala	Penanggung Jawab: Perindag, BKP2, Pertanian, Perikanan.	Tersedianya informasi harga pangan strategis serta stabilnya harga pangan	20 Kabupaten/Kota
		Pengelolaan pasokan pangan dan cadangan penyangga untuk stabilitas harga pangan	Penanggung Jawab: Bulog, Perindag, BKP2.	Siap sedianya pasokan pangan, terutama pada saat paceklik, gagal panen dan bencana alam	20 Kabupaten/Kota
7.	Meningkatkan Aksesibilitas Rumah Tangga terhadap pangan	Pemberdayaan masyarakat miskin dan rawan pangan, perempuan dan anak	Penanggung Jawab : BPMD, BKP2, Dinkes, NGOs,	Berkurangnya kasus Rawan pangan, gizi buruk balita dan perempuan	20 Kabupaten/Kota
8.	Melakukan Diversifikasi pangan	Peningkatan diversifikasi produksi dan konsumsi pangan dengan gizi	Penanggung Jawab : Dinkes, BKP2, NGOs, Pertanian, Perikanan, Bappeda.	Berkembangnya produksi dan konsumsi sumber energi dan protein dari pangan lokal	20 Kabupaten/Kota

No	Tujuan Kebijakan	Kegiatan	Pelaksana	Indikator Keberhasilan (output)	Lokasi
		seimbang			
		Pemberian makanan tambahan untuk anak sekolah (PMTAS)	Penanggung Jawab : Dinkes, Diknas, NGOs. Pokmas.	Meningkatnya kesehatan dan kecerdasan anak sekolah yang tercermin dari absensi kehadiran dan nilai yang diperoleh	20 Kabupaten/Kota
		Pengembangan teknologi pangan	Penanggung Jawab : BPTP, Perguruan Tinggi,	Tersedianya pangan alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap pangan pokok seperti beras dan tersedianya teknologi pertanian tepat guna.	20 Kabupaten/Kota
		Diversifikasi usahatani dan pengembangan pangan lokal	Penanggung Jawab : Pertanian, BKP2, NGOs, Poktan.	Terintegrasinya peran Komoditi pangan segar/primer dengan peran pangan olahan	20 Kabupaten/kota
9.	Meningkatkan Mutu dan	Pengembangan dan penerapan sistem	Penanggung Jawab : Pertanian, BKP2,	Bertambahnya pangan bermutu dan	20 Kabupaten/kota

No	Tujuan Kebijakan	Kegiatan	Pelaksana	Indikator Keberhasilan (output)	Lokasi
	Keamanan pangan	mutu pada proses produksi, olahan dan perdagangan pangan	BPOM, Perindustrian.	menurunnya kasus pencemaran pangan.	
		Peningkatan kesadaran mutu dan Keamanan pangan pada konsumen	Penanggung Jawab : Kesehatan, NGOs,	Meningkatnya masyarakat yang sadar mutu dan keamanan pangan.	20 Kabupaten/kota
		Pencegahan dini dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan mutu dan keamanan pangan	Penanggung Jawab : BPOM, Kepolisian, BKP2, Dinkes, Perindag.	Berkurangnya pangan tidak mutu dan tidak aman, dan terciptanya mekanisme penanganan dampak negatif pangan	20 Kabupaten/kota
10.	Mencegah dan Menangani Rawan pangan dan Gizi	Pengembangan kewaspadaan dini dan penanggulangan	Penanggung Jawab : BKP2, Dinkes, Sosial	Meningkatnya kemampuan setiap rumah tangga untuk	20 Kabupaten/kota

No	Tujuan Kebijakan	Kegiatan	Pelaksana	Indikator Keberhasilan (output)	Lokasi
		keadaan rawan pangan dan Gizi		mengetahui potensi terjadinya rawan pangan Mengurangi Balita Gizi Buruk secara signifikan	
		Peningkatan keluarga sadar gizi melalui penyuluhan dan bimbingan sosial dengan menyempurnakan sistem komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	Penanggung Jawab : Dinkes, NGOs., Diknas	Meningkatnya masyarakat sadar gizi seimbang	20 Kabupaten/kota
		Pemanfaatan lahan pekarangan untuk peningkatan gizi keluarga	Penanggung Jawab : BKP2, Pertanian, Perikanan.	Peningkatan produksi di lahan pekarangan dan konsumsi pangan keluarga dengan pangan lokal yang mengandung gizi seimbang	20 Kabupaten/Kota
11.	Memfasilitasi Penelitian	Alokasi anggaran yang memadai	Penanggung Jawab : DPRD, Biro/bag	Terwujudnya alokasi anggaran penelitian	20 Kabupaten/Kota

No	Tujuan Kebijakan	Kegiatan	Pelaksana	Indikator Keberhasilan (output)	Lokasi
	dan Pengembangan Pertanian	untuk penelitian dan pengembangan	Keuangan, BAPPEDA, Balitbang, PT.	dan pengembangan bidang pangan yang signifikan	
		Peningkatan kerjasama dan kemitraan antara lembaga penelitian	Penanggung Jawab : BAPPEDA, Balitbang, PT, BPTP.	Semakin besarnya dukungan dari berbagai pihak untuk melakukan penelitian dan pengembangan pangan lokal secara berkelanjutan	20 Kabupaten/Kota
12.	Mengembangkan Sumberdaya Manusia	Perbaikan program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pangan	Penanggung Jawab : Diknas, BKP2, BDA, Dinkes, NGOs,	Tersusunnya program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pangan yang lebih komprehensif	20 Kabupaten/Kota

No	Tujuan Kebijakan	Kegiatan	Pelaksana	Indikator Keberhasilan (output)	Lokasi
		Pemberian jaminan pendidikan dasar dan menengah khususnya bagi perempuan dan anak-anak	Penanggung Jawab : Diknas,	Setiap anak di NTT mendapatkan pendidikan dasar dan menengah	20 Kabupaten/kota
		Alokasi APBD yang memadai bagi pengembangan sektor pertanian dan pangan	Penanggung Jawab : DPRD, BAPPEDA, Biro/Bag. Keuangan	Tersedianya dana APBD yang memadai bagi pengembangan sarana dan produk pertanian	20 Kabupaten/kota
		Kebijakan perdagangan yang memberikan proteksi dan promosi bagi produk pertanian lokal	Penanggung Jawab : DPRD, Perindag,	Terlaksananya kebijakan daerah yang melindungi produk pertanian lokal	20 Kabupaten/kota

No	Tujuan Kebijakan	Kegiatan	Pelaksana	Indikator Keberhasilan (output)	Lokasi
13.	Antisipasi terhadap dampak Perubahan Iklim	Strategi antisipasi terhadap perubahan iklim	Penanggung Jawab : BMG, Pertanian, Perhubungan, Kimpraswil.	Terlaksananya strategi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim	20 Kabupaten/kota

VII PENUTUP

Demikian Rencana Aksi Bersama pada NTT Food Summit Tahun 2008 dibuat untuk dipedomani dan menjadi pegangan bersama oleh seluruh stake holders dalam upaya peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerawanan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Maumere, 29 Oktober 2008

Ditanda tangani bersama oleh :

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Drs. Melkianus Adoe	Ketua DPRD Provinsi NTT	
Dr. Tjuk E. H. Basuki, MSc	Kapus Ketersediaan dan Kerawanan Pangan BKP Deptan RI	
Drs. Petrus Langoday	Sekretaris DKP Provinsi NTT	
Drs. Sosimus Mitang	Bupati/ Ketua DKP Kabupaten Sikka	
Rafael Raga, SP	DPRD Kabupaten Sikka	
Ir. I. Bagus Putu Punia, MSi	Sekretaris DKP Kabupaten Sumba Timur	
Ir. Imam Suharto, MSc	VECO Indonesia	
Fredy Olin	Perwakilan Petani	
Dwi Astuti	Pokja Khusus Pemberdayaan Ketahanan Pangan Masyarakat- DKP Pusat	
Aloysius Talan, SP	Yayasan Mitra Tani Mandiri	